

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genteng, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu.

Sebagaimana yang tercantum dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan itu merupakan tanggungjawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, terlebih pada era

otonomi sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah) saat ini peran serta orang tua dan masyarakat sangat menentukan.

Partisipasi masyarakat dan orang tua di sekitarnya sangat penting. Di satu sisi sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di lain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika orang tua dan masyarakat dapat saling melengkapi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.

Partisipasi orang tua dan masyarakat hendaknya diperhatikan oleh pihak sekolah, khususnya kepemimpinan Kepala Sekolah agar dapat terwujud dan terpelihara keberadaannya. Pada akhirnya apabila partisipasi telah terpelihara dengan baik, maka sekolah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengembangkan berbagai jenis program, karena semua pihak telah memahami dan merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah.

Dengan sendirinya agar semua terpelihara dengan baik, maka harus ada komunikasi timbal balik antara sekolah dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat setempat dan orang tua murid, sehingga sekolah, masyarakat dan orang tua merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu di sekolah.

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Dewan Pendidikan dibentuk di setiap Kabupaten/Kota, sementara Komite Sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Selanjutnya, guna memudahkan masyarakat dalam membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disertai Lampiran-lampiran. Lampiran I merupakan Acuan Pembentukan Dewan pendidikan, sementara Lampiran II merupakan Acuan Pembentukan Komite Sekolah.

Komite Sekolah satu di antara komponen strategis dalam satuan pendidikan. Setiap satuan sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) memiliki berbagai komponen yang menjadi bagian dari satuan pendidikan. Sebuah satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah dan beberapa wakil kepala sekolah, guru sebagai tenaga pendidik, staf administrasi sebagai tenaga kependidikan, siswa dan komite sekolah. Kepala Sekolah (Kepsek) dalam melaksanakan kinerjanya biasanya di-back up oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum, Bidang Administratif, Bidang Kesiswaan dan bidang-bidang lainnya . Komite Sekolah mempunyai peranan dan

fungsi strategis pada setiap satuan pendidikan. Ada 5 peranan komite sekolah (Diknas RI, 2006):

1. Peranan *advisory* (pemberi pertimbangan) dengan fungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai (a) RAPBS, (b) kebijakan dan program pendidikan, (c) kriteria kinerja satuan pendidikan, (d) kriteria tenaga kependidikan, (e) kriteria fasilitas pendidikan dan (f) hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
2. Peranan *supporting* (pendukung) dengan fungsi (a) mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, (b) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (c) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Peranan *controlling* (pengontrol) dengan fungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Peranan *mediator*, dengan fungsi (a) melakukan kerjasama dengan masyarakat, (b) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan

Komite Sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu juga Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Komite Sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri dan pemerintah, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Di samping itu, Komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan

program pendidikan; kriteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Komite Sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan masyarakat adalah konsumen pendidikan yang harus dipenuhi harapan dan kebutuhannya oleh sekolah. Adapun sekolah dalam proses memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, membutuhkan dukungan dari masyarakat tersebut baik itu berupa financial ataupun dukungan yang berbentuk ide atau gagasan yang dapat berkontribusi positif terhadap pelayanan yang diberikan sekolah kepada masyarakat sebagai konsumennya.

Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya kepada generasi mudanya. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan, atau secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisasi (Nasution, 1999).

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan

keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa dapat belajar banyak karena dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat usaha orang tua mereka dalam memberikan dukungan.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa kontribusi material maupun nonmaterial, keikutsertaan secara aktif maupun nonaktif/pasif. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan perlu perlu ditampung dan disalurkan melalui sebuah lembaga atau badan mandiri yang disebut Komite Sekolah.

Peran yang dijalankan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Penghambat timbulnya partisipasi masyarakat terhadap peningkatan

kualitas pendidikan di sekolah dasar adalah terjadinya jurang pemisah antara pihak sekolah dengan orang tua murid atau masyarakat. Hendaknya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dengan masyarakat yang melakukan suatu aktivitas bersama dalam mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan.

Mengacu pada uraian singkat dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk lebih dalam melakukan penelitian tentang kinerja pengurus komite dan partisipasi masyarakat yang akan dituangkan dalam suatu penelitian dengan judul “Kontribusi Kinerja Pengurus Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat disekolah Dasar Negeri Gugus VII Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai sejauhmana pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja seajar sekolah terutama terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

Dari pokok masalah tersebut, selanjutnya dijabarkan kedengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Gambaran besar kinerja pengurus Komite Sekolah di Sekolah dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur?

2. Seberapa besar dan gambaran Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur ?
3. Gambaran kontribusi kinerja pengurus Komite Sekolah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur ?

C. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

a. **Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar objektivitas kinerja pengurus Komite Sekolah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.

b. **Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai kontribusi kinerja pengurus Komite Sekolah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur.
- b. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di

Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur .

- c. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai kinerja pengurus Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur .
- d. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja pengurus Komite Sekolah dan masyarakat sebagai Stakeholder dalam pendidikan serta bagi pihak sekolah dalam rangka memeberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya sehingga mutu pendidikan di sekolah meningkat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

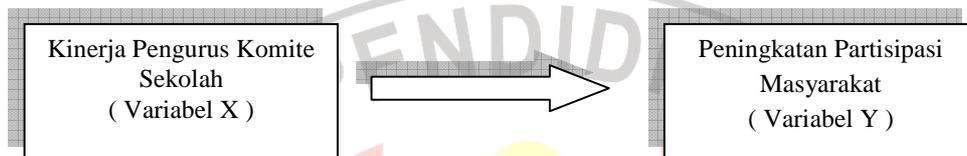
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan sekaligus dapat mengembangkan dan memperkaya wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Komite Sekolah, masyarakat, dan sekolah, agar mampu meningkatkan kinerjanya yang akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

D. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan dalam memahami jalannya penelitian ini, maka di bawah ini digambarkan kerangka berfikir yang menjiwai proses penelitian ini yaitu:



Keterangan :

Variabel X : Kinerja Pengurus Komite Sekolah

Variabel Y : Peningkatan Partisipasi Masyarakat

→ : Kontribusi Kinerja Pengurus Komite Sekolah terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat

E. Anggapan Dasar

Adapun yang menjadi anggapan dasar atau titik tolak pemikiran penulis dalam penelitian ini adalah:

Komite Sekolah dibentuk sebagai mitra kerja sejajar dengan sekolah agar dapat mendorong dan mensinergikan partisipasi masyarakat

Komite sekolah dapat berperan dan berfungsi dengan efektif jika didukung oleh kesiapan dan *power sharing* antara pihak komite sekolah dan sekolah

Pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena pendidikan diselenggarakan dilingkungan masyarakat dan untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Kontribusi Komite Sekolah dalam mewadahi partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti yang harus diuji kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (1998: 67) yang mengemukakan bahwa: “Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kinerja pengurus Komite Sekolah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur”.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan ruang lingkup masalah yang diteliti, maka penulis akan menjelaskan definisi istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini sehingga terdapat persamaan pandangan antara penulis dan pembaca. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pengurus Komite Sekolah

Mangkunegara (2002:67) mengungkapkan bahwa : “ Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya“.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan kinerja pengurus Komite Sekolah dalam penelitian ini adalah kinerja Komite Sekolah di SD yang berada di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur.

2. Partisipasi Masyarakat

Tim Pokja MBS Jawa Barat (2003:84) mengartikan partisipasi masyarakat dalam konteks MBS adalah: “Kesadaran dan Kepedulian masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas untuk turut serta mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan suatu program pendidikan disekolah secara professional yang dilandasi kesepakatan”.

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah dukungan baik berupa bantuan ide/gagasan, bantuan dana, ataupun tenaga yang berkontribusi positif terhadap kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur.

3. Kontribusi

Kontribusi adalah keikutsertaan seseorang terhadap sesuatu yang mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap sesuatu yang dilakukannya.

Dari pernyataan tersebut bahwa kontribusi yang dilakukan komite sekolah terhadap sekolah dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur yang bersifat positif dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, maka metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang dimungkinkan dilakukannya pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket tertutup yang ditunjang dengan studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asosiatif, Menurut Kriyantono (2006,168), analisis hubungan (Asosiatif) adalah analisis yang menggunakan uji statistik inferensial dengan tujuan untuk melihat derajat hubungan diantara dua atau lebih dari dua variable , yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi kinerja pengurus Komite Sekolah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sukaresmi Gugus VII Kabupaten Cianjur.

I. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri Gugus VII di Kabupaten Cianjur Kecamatan Sukaresmi sebanyak 7 sekolah.

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, menurut Sugiyono (2003:90) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri yang berada di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten yang berjumlah 7 sekolah dengan objek penelitiannya adalah Kepala Sekolah dan guru di seluruh Sekolah Dasar Negeri tersebut yang berjumlah 7 yaitu terdiri dari 7 orang kepala sekolah dan 53 orang guru.

3. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sumber informasi dan data yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Sugiyono (2003:91) mengemukakan bahwa pengertian sampel adalah “ bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ”. adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *stratified proportional random sampling* yaitu cara perhitungan sampel yang didasarkan pada pendugaan proporsi populasi.